



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

SUBBAGIAN HUMAS

Taufik Sebut Akan Ada Tersangka Kasus RSSW

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik optimistis aparat penegak hukum akan bekerja cepat membongkar dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Sehingga, pada Oktober 2015 mendatang sudah ada tersangka yang ditapkan.



Kejanggalan Pembelian Lahan RSSW

"Dengan lengkapnya data temuan BPK dan juga Pansus DPRD, aparat hukum tidak akan kesulitan menetapkan tersangka dalam kasus ini," ujar Taufik pada INDOPOS, kemarin. Dia juga berani bertaruh, jika pejabat tertinggi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Oktober pasti jadi tersangka dan ditangkap. Tunggu saja," terang juga Ketua DPD Gerindra DKI ini. Sebelumnya, Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang perwakilan BPK untuk berkonsultasi tentang temuan BPK terhadap Pemprov DKI.

Salah satunya adalah temuan BPK tentang pengadaan tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang dinilai tidak melalui proses yang benar ■

Akibat proses pembelian tanah sekitar Rp 800 miliar itu terdapat kemahalan pembelian atau dugaan kerugian negara mencapai Rp 191 miliar yang menggunakan uang APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 tersebut.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Efdinal menjelaskan bahwa BPK mudah saja melihat sesuatu yang berpotensi menjadi sebuah temuan. Efdinal mengatakan BPK tinggal melihat saja prosedur pembelian lahan RSSW yang seharusnya dijalankan dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Terkait pemeriksaan pembelian lahan Sumber Waras, kita sudah sesuai prosedur. Misalnya dikatakan dalam pembelian lahan tidak boleh dilakukan langsung tetapi harus ada tim. Nah tinggal itu dilihat, ada atau enggak timnya. Kalau tidak ada ya ada indikasi temuan. Gampang saja," ujar Efdinal di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (21/9) lalu.

Efdinal juga membantah jika BPK terkesan selalu mencari-cari kesalahan Pemprov DKI. Dia juga menegaskan BPK hanya menjalankan saja apa yang menjadi tugas mereka yaitu

melakukan audit terhadap anggaran di provinsi-provinsi tiap tahunnya.

Efdinal juga menjelaskan mengenai kebingungan yang sempat diungkapkan Pemprov DKI dan juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab, tanah yang dibeli Pemprov DKI memiliki sertifikat dengan alamat Jalan Kyai Tapa. Pajak yang dibayarkan pun disesuaikan dengan alamat yang tertera pada sertifikat.

Hal tersebut menjadi salah satu landasan pihak Sumber Waras yang menyebut lahan yang dibeli Pemprov DKI memang terletak di Jalan Kyai Tapa dan bukan Jalan Tomang Utara. Menjawab hal ini, Efdinal menjelaskan bahwa pembebasan tanah biasanya dilakukan berdasarkan peta bidang dan bukan lokasi tanah.

Dalam peta bidang, lahan yang dibeli Pemprov DKI terletak di Jalan Tomang Utara. Sehingga, harga yang harus dibayar disesuaikan dengan NJOP Jalan Tomang Utara. "Bahwa pembebasan tanah itu berdasarkan peta bidang tanah bukan lokasi tanah. Alamatnya betul di Jalan Kyai Tapa tetapi peta bidangnya di mana? Itu saja enggak usah susah-susah memahaminya," cetus Efdinal juga. **(wok)**